



RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
Senin, 7 Juli 2025

TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

UNDANGAN RADIOGRAM



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI : MENTERI DALAM NEGERI			
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA			
TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI			
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA			
Nomor : 500.2.3/3669/SJ			
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN STRATEGI MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA			
AAA	TTK	RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR <i>ONLINE</i> PD HARI SENIN TGL 7 JULI 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM <i>MEETING</i> DGN <i>MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA</i> DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL <i>YOUTUBE</i> KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA	
BBB	TTK	AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 KMA STRATEGI MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA	
CCC	TTK	BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA	
	SATU	TTK	GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA <i>ONLINE</i> BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA
	DUA	TTK	BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA <i>ONLINE</i> BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA
	TIGA	TTK	GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA
	EMPAT	TTK	DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DI INFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA
	LIMA	TTK	GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI <i>DRESS CODE</i> PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA
DDD	TTK	UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA	
EEE	TTK	DUM TTK HBS	

TANGGAL PEMBUATAN 6 Juli 2025

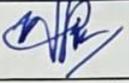
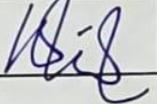
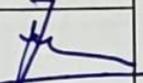
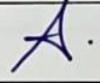
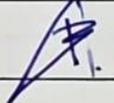
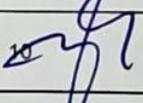
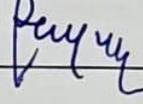
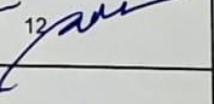
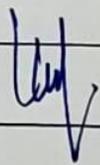
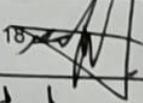
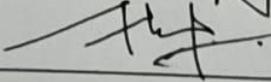
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Toms Tohir		Terima	Kirim		
Tanda Tangan :					

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi

Hari/Tanggal : Senin / 7 Juli 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Wartono	wakil Walikota		1 
2	SRI CAKUMA	Asisten 2	P	2 
3	Eddy Sam	Ditmas	L	3 
4	FADILURAHMAN	ky Fls & SD	L	4 
5	FIKRI N.S.	INSPEKTORAT	L	5 
6	Krisman	diskominpo	L	6 
7	Fathmrohman	DPUPR	L	7 
8	FITRIYADI	DISDAS PR...	L	8 
9	Agus Muslim	BPS RJT	L	9 
10	Wickah	Diskopum dan	P	10 
11	Reny Yudiarni	DISPERKIM	P	11 
12	Arief R.H	BPKAD	L	12 
13	Isnani. Zain	Bappenda Ajb		13 
14	DIND FORTIA ASUTI	BAG. PEREKONOMIAN		14 
15	Indra Azhari	Bag. Perekonomian		15 
16	Taufik	PROFOPIM		16 
17	Ade	- - -		17 
18	Abal	POL PP		18 
19	Suswanti	POL PP		19 

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/3669/SJ Tanggal 6 Juli 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil : **1. Badan Pangan Nasional**

Realisasi penyaluran beras SPHP Tahun 2025

No	Periode Penugasan	Target (Kg)	Realisasi (Kg)	% Realisasi
1	Periode Jan-Feb 2025	300.000.000	100.955.106	33,65%
2	Periode HBKN Ramadhan Idulfitri 2025	150.000.000	80.218.265	53,48%
Total		450.000.000	181.173.371	40,26%

- ✓ Berdasarkan target total SPHP beras tahun 2025 sebesar 1.500.000.000 Kg. Realisasi SPHP sampai dengan Maret 2025 sebesar 181.173.371 kg, maka sisa target tahun 2025 sebesar 1.318.826.629 kg
- ✓ Pelaksanaan penyaluran SPHP setelah proses revisi anggaran belanja tambahan (ABT) disetujui dan anggaran telah masuk di BA 125. Penyaluran harus diawasi dengan ketat

Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025

- a) Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,64 juta ton setara beras
- b) Penguatan cadangan beras pemerintah
- c) Penyaluran beras SPHP
- d) Penyaluran bantuan pangan tahun 2025
- e) Gerakan pangan murah (GPM)
- f) Panel harga pangan
- g) Kios pangan sebanyak 1.045 unit
- h) Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024)
- i) Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan
- j) Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan
- k) B2SA go to school, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
- l) Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar
- m) Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi

Aksi Badan Pangan Nasional menjaga stabilitas dan inflasi pangan tahun 2025 yaitu: melakukan pemantauan dan pengawasan harga, melakukan gerakan pangan murah, melakukan fasilitasi distribusi pangan, menyediakan kios pangan, melakukan penyaluran SPHP beras dan bantuan pangan serta melakukan monitoring dan evaluasi pasokan dan harga pangan.

NOTULEN RAPAT

2. Badan Pusat Statistik

- a) Perkembangan harga cabai rawit sampai dengan M1 Juli 2025
 - Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada M1 Juli 2025 berada di atas harga acuan penjualan (HAP)
 - Secara umum, harga cabai rawit s.d. M1 Juli 2025 naik 15,43% dibanding Juni 2025.
 - Cabai rawit mengalami kenaikan harga di 65,56% wilayah di Indonesia
- b) Perkembangan harga bawang merah sampai dengan M1 Juli 2025
 - Secara nasional, rata-rata harga bawang merah pada M1 Juli 2025 berada di atas harga acuan penjualan (HAP)
 - Secara umum, harga bawang merah s.d. M1 Juli 2025 naik 5,86% dibanding Juni 2025.
 - Bawang merah mengalami kenaikan harga di 69,72% wilayah di Indonesia

3. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

- a) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh kementerian pertanian dan satgas pangan di 10 provinsi, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
 - Mutu kualitas produk
 - Berat netto tidak sesuai label
 - Pelanggaran harga eceran tertinggi (HET)
 - Izin edar tidak sesuai standar/ketentuan
- b) Saran dan tindakan dari aspek hukum:
 - Penegakan hukum terhadap pelanggaran mutu dan berat
 - Pendampingan terhadap pemda dan dinas teknis terkait
 - Penegakan hukum terhadap pelaku usaha tanpa izin edar
 - Pencegahan dan edukasi hukum
 - Penginkatan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengawasan pangan
 - Mendorong penggunaan teknologi pengawasan (QR code legalitas e-distribusi, barcode HET) untuk menjamin transparansi
 - Pemda wajib menetapkan regulasi teknis yang mengatur pelabelan, mutu dan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran.
- c) Anomali harga beras berdampak pada inflasi pangan dan daya beli masyarakat, sehingga diperlukan intervensi terpadu melalui penguatan distribusi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran mutu/kualitas, timbangan, berat, HET dan izin edar.
- d) Kejaksaan mempunyai peran strategis dalam menjaga kepatuhan hukum, baik secara preventif (Pendampingan), deteksi dini (intelijen), maupun represif (penegakan hukum) guna menjaga stabilitas harga serta mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat
- e) Pendampingan dan asistensi hukum terpadu kepada Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait dalam distribusi dan pengawasan beras agar tepat sasaran, sesuai hukum dan bebas dari penyimpangan.
- f) Penegakan hukum selektif dan terukur terhadap pelanggaran mutu/kualitas, timbangan, berat, HET dan izin edar guna menjaga stabilitas harga serta mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

4. Kementerian Perdagangan

- Program minyak goreng rakyat merupakan hasil kewajiban pasok domestik (DMO/Domestic Market Obligation) dari para produsen di dalam negeri terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya (bukan subsidi APBN). Setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.
- Realisasi DMO bulan Juni sebesar 157.952 ton yang seluruhnya dalam bentuk minyakita
- Tabel harga rata-rata Minyakita regional pada Juli 2025

No	Regional	Harga (Rp/liter)			Perbandingan (%)		
		04-Jul	H-7	H-30	HET	H-7	H-30
1	Nasional	16.672	16.683	16.840	6,19%	-0,07%	-1,00%
2	Sumatra	16.472	16.439	16.495	4,92%	0,20%	-0,14%
3	Jawa	16.436	16.642	16.597	4,69%	-1,24%	-0,97%
4	Kalimantan	17.095	17.080	17.092	8,88%	0,09%	0,02%
5	Sulawesi	16.310	16.278	16.346	3,89%	0,20%	-0,22%
6	Bali Nusra	17.400	17.525	17.992	10,83%	-0,71%	-3,29%
7	Maluku Papua	16.857	16.771	17.290	7,37%	0,51%	-2,51%

5. Kementerian Pertanian

- Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2,137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya
- Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya.
- Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2,716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya.
- Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri
- Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan.
- Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor
- BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera
- Sukseskan program Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

6. Kantor Staf Presiden

a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman		Daging Sapi, Kedelai	Cabai Merah Keriting
	Waspada	Minyakita, Gula Pasir Curah	Bawang Putih, Beras Medium (Zona 2)	Jagung Tk Peternak, Telur Ayam Ras
	Tidak Aman		Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 3)	Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Daging Ayam Ras

b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir Update data per 4 Juli 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Jayawijaya	8	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Merauke	8	Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kota Ternate	7	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Nabire	5	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi
Kota Jayapura	5	Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Sorong	4	Bawang Putih, Beras Medium, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Mimika	4	Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Kayong Utara	4	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Sorong Selatan	3	Bawang Merah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kota Tual	3	Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Manokwari	3	Bawang Putih, Beras Medium, Jagung Tk Peternak
Kab. Sumba Timur	3	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kota Kupang	3	Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Boliung Timur	2	Bawang Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Morowali	2	Bawang Merah, Gula Pasir Curah
Kota Tarakan	2	Beras Medium, Telur Ayam Ras
Kota Banjarmasin	2	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Halmahera Tengah	2	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras
Kota Manado	2	Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras
Kab. Timor Tengah Selatan	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kota Gunungstoli	2	Gula Pasir Curah, Kedelai
Kab. Berau	2	Gula Pasir Curah, Daging Sapi
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak

7. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Upaya percepatan pelaksanaan progeam nasional tiga juta rumah, yaitu:

- Pembebasan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG)
- Mempercepat proses izin PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 hari dari awalnya 45 hari sejak dokumen permohonan lengkap.

Arahan strategis kepada Pemerintah Daerah yaitu:

- Seegera mengimplementasikan Kebijakan Presiden terkait dengan insentif fiskal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) dengan memberlakukan pembebasan PBG dan BPHTB Gratis.
- Mensosialisasikan secara masif program PBG dan BPHTB Secara Gratis pada seluruh Masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh PEMDA(Videotron, Baliho, Medsos Pemda, dll).
- Melakukan pendampingan kepada Desa dalam Musrembang Desa agar menganggarkan kegiatan Perumahan dalam APBDDesa.
- Menganggarkan Pembangunan Rumah Baru/RTLH dalam APBD.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- e) Mengkoordinasikan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pendataan perumahan Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan turut serta berkoordinasi Kepada PemKab, PemDes, maupun Dinas/OPD terkait dengan Pendataan Perumahan.
- f) Meningkatkan pengawasan kepada Developer/Pengembang Perumahan agar perumahan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dalam PBG dan SitePlan yang telah di sah-kan agar Masyarakat Mendapatkan Hak-Haknya.
- g) Melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai Perumahan terutama lahan negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan(Lahan Kas Desa, Lahan Pemerintah Daerah, Lahan Negara, Lahan Kementerian/Lembaga, Lahan Hibah Masyarakat) yang dapat digunakan untuk perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- a) Kementerian PPN/Bappenas, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik berkolaborasi menyiapkan mekanisme pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional dalam mendukung upaya pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen
 - Pemantauan: meninjau tantangan dan perkembangan kinerja daerah melalui indikator proksi ekonomi terpilih.
 - Pengawasan: Koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mengawal dan menyelesaikan hambatan yang ada terjadi di lapangan.
 - Percepatan: mendorong laju pertumbuhan ekonomi sesuai sasaran melalui “berbagai langkah konkret bersama”
- b) Daerah merupakan garda depan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan dan ketepatan respon pemerintah sangat menentukan pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi.

9. Tentara Nasional Indonesia

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Juni 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM, serbuan ter serta Kampung Bahari Nusantara.
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-1 Juli 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar -0,37 (Deflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Daging Ayam Ras (-0,5324), bawang putih (-0,1347) dan Cabai Merah (-0,0776). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Tetap menjaga distribusi pasokan Minyakita agar tidak terjadi kelangkaan stok barang di masyarakat.
- 4) Menjaga distribusi gas LPG 3kg yang saat ini terjadi kelangkaan di Kota Banjarbaru, serta melakukan monitoring ke pangkalan secara rutin
- 5) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (7 Juli 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru